

BAB III

BERBAGAI DASAR KLAIM ARGENTINA DAN INGGRIS ATAS KEPULAUAN FALKLAND (MALVINAS) DAN UPAYA PERDAMAIAN YANG TELAH DITEMPUH

Dalam sengketa terhadap Kepulauan Falkland, Argentina dan Inggris memiliki klaim yang berbeda atas Kepulauan Falkland. Dan klaim-klaim tersebut memiliki pendekatan-pendekatan yang berfungsi untuk mendukung klaim keduanya atas Kepulauan Falkland. Dan pada bab ini selain dijelaskan tentang klaim Argentina dan Inggris atas Kepulauan Falkland, juga akan dijelaskan pula upaya-upaya damai yang telah diupayakan kedua negara sebelum terjadinya perang Falkland di tahun 1982.

A. Dasar-dasar Klaim Argentina dan Inggris atas Kepulauan Falkland

1. Klaim Argentina

Secara umum klaim Argentina atas Kepulauan Falkland berdasar pada sejumlah teori yang ada. Dalam klaimnya Argentina mengambil pendekatan dari dua dasar utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang memakai cara untuk mendapatkan dan menggunakan data-data agar Argentina dapat menunjukkan klaimnya.

Dalam pendekatan pertama Argentina ini, Argentina lebih mengacu pada data-data sejarah tempo dulu, yaitu pada masa Kerajaan Spanyol masih berkuasa.

Pendekatan yang kedua adalah sebuah bentuk pendekatan yang mencoba untuk mencari kelemahan klaim Inggris atas Kepulauan Falkland, dan Argentina menggambarannya dalam dua poin: (1) Kependudukan Inggris di Falkland pada tahun 1833 merupakan tindakan kolonialisme dan Inggris tidak memiliki klaim yang kuat. (2) Pengabaian yang diakui oleh pihak Inggris.

Di dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Argentina ada sebuah pendekatan yang ditujukan untuk membalas klaim Inggris atas Kepulauan Falkland. yang mana dalam pendekatan tersebut Argentina mengatakan bahwa di masa lalu Inggris pernah mengakui kepemilikan/kedaulatan Spanyol atas Kepulauan Falkland, dan hal itu terjadi sampai dengan abad ke-18. Selain itu, Inggris juga tidak mengambil tindakan apapun pada saat Pemerintah Argentina di tahun 1910 menerbitkan sebuah peta yang di dalamnya juga menyatakan Falkland sebagai bagian dari kedaulatannya, padahal seperti yang kita ketahui, dasar klaim Inggris berdasar pada kependudukannya di tahun 1833.

Kembali pada dasar klaim-klaim Argentina. Argentina mengatakan bahwa Kepulauan Falkland sudah merupakan bagian dari wilayah Argentina sejak tahun 1816, pada masa *Provincias Unidas del Río de la Plata* (Kesatuan

wilayah kepulauan tersebut, yang mana pendapat ini kemudian juga disetujui oleh Parlemen Inggris.²⁵

Berdasarkan pada Perjanjian Notka Sound antara Spanyol dan Inggris di tahun 1790, Inggris menyatakan bahwa pemerintahannya tidak memiliki hak apapun atas Kepulauan Falkland dan mengakui kedaulatan Spanyol atas kepulauan tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam pasal IV dalam Perjanjian Notka Sound yang menyebutkan bahwa Inggris setuju bahwa tidak ada satupun kapal milik Inggris yang boleh memasuki daerah kekuasaan Spanyol, termasuk di dalamnya Kepulauan Falkland itu sendiri.²⁶

Bukti-bukti sejarah diatas, menjadi suatu alat bagi Argentina untuk membantah klaim Inggris atas Kepulauan Falkland. Dalam hal ini Argentina menganggap bahwa Kepulauan Falkland adalah bagian dari wilayah kedaulatan yang tidak dapat terpisahkan dari Argentina dan Inggris tidak memiliki landasan yang kuat atas klaimnya terhadap Kepulauan Falkland. Jadi, Argentina menganggap bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih terhadap klaim atas Kepulauan Falkland dan kependudukan paksa Inggris atas kepulauan tersebut di tahun 1833 merupakan tindakan yang illegal, yang mana pendapat ini juga memiliki makna yang selaras dengan pendapat yang

²⁵ Hoffman, Fritz L and Olga Mingo, *Sovereignty in Dispute: The Falklands/Malvinas 1493-1982*, United States of America: Wetsview Press, 1984. Hal. 60

²⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Notka_Sound. Diakses pada 21 September 2010

sebelumnya pernah diberikan oleh Parlemen Inggris itu sendiri, yang menyatakan Inggris tidak memiliki klaim apapun atas kepulauan tersebut.²⁷

Pada kesimpulannya, terhadap klaim atas Kepulauan Falkland, Argentina memiliki banyak pendekatan-pendekatan untuk mendukung segala argumennya. Pendekatan pertama, Argentina banyak mengacu pada dokumen-dokumen sejarah masa lalu, dan pendekatan yang kedua, Argentina mencoba untuk mematahkan segala bentuk klaim Inggris atas Kepulauan Falkland.

Selain itu dari semua hal yang disebutkan diatas, Argentina juga mempunyai dua poin lainnya dalam dasar klaimnya atas Kepulauan Falkland, yang antara lain adalah:

1. Argentina mengklaim bahwa Argentina telah lebih dulu memasukkan wilayah kepulauan ini kedalam wilayah kedaulatannya, yang mana peristiwa ini terjadi pada 6 November 1820, di mana Argentina, mendeklarasikan kepemilikannya atas kepulauan ini melalui David Jewitt, kapten kapal *Heroína*. Peristiwa ini juga diketahui oleh konsul Inggris, bahkan pemerintahan Inggris pada masa itu sama sekali tidak mengajukan protes atas tindakan yang dilakukan oleh Jewitt ini.
2. Berdasarkan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982, maka bisa dikatakan Kepulauan Falkland masuk kedalam landasan

²⁷ Hoffman, Fritz L and Olga Mingo, *Sovereignty in Dispute: The Falklands/Malvinas 1493-1982*, United States of America: Wetsview Press, 1984. Hal. 84

kontingen pemerintah Argentina²⁸, yang berarti Argentina memiliki hak untuk mengklaim kepulauan ini sebagai bagian dari kedaulatannya. Ini dapat dilihat dalam pasal 84, ayat 1, yang berbunyi:

"Penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya."

Bagi Argentina hal tersebut merupakan suatu tindakan nyata untuk mempertahankan kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland.

2. Klaim Inggris

Berbeda dengan Argentina, klaim Inggris atas Kepulauan Falkland lebih ditekankan pada peristiwa yang terjadi di masa paska Perang Dunia I dan setelahnya. Meskipun begitu, Inggris tidak menutup kemungkinan akan adanya sedikit hal yang berkaitan dengan sejarah masa lalu.

Selain itu Inggris juga mengakui bahwa, disamping klaim Argentina atas Kepulauan Falkland, yang telah dipersiapkan Argentina guna melawan klaim Inggris, Inggris juga membuat pengakuannya atas Kepulauan Falkland melalui berbagai tindakan.

²⁸ http://www.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea. Diakses pada 28 Oktober 2010

Secara historis, Inggris menyatakan klaimnya berdasarkan pada kependudukannya di Port Egmont (Falkland Barat) pada tahun 1771-1774. Pada saat Inggris pergi meninggalkan Port Egmont, mereka sebuah tanda kepemilikan berupa sebuah piringan timah yang disitu menyatakan bahwa Falkland dengan segala isi dan bangunanya adalah sepenuhnya milik Yang Mulia Raja George III.

(Be it known to all nation that the Falkland Islands, with this fort, the storehouses, wharfs, bays, and creeks thereunto belonging are the sole right and property of His Most Sacred Majesty George the Third, King of Great Britain, Fraance, and Ireland, Defender of Faith, etc. In witness whereof this plate is set up, and His Britanic Majesty's color's left flying as a mark of possession by S.W. Clayton, commanding officer at Falkland Islands, A.D. 1774.)²⁹

Pemerintah Inggris mulai secara yakin mengajukan klaimnya atas Kepulauan Falkland ini, setelah dikeluarkannya sebuah hukum Internasional baru yang muncul paska Perang Dunia I. Hukum ini disebut *prescription*, sebuah asas yang memberikan hak pada suatu negara untuk menduduki suatu wilayah secara damai untuk masa waktu yang cukup panjang tanpa interupsi, dapat mengklaim kedaulatannya atas wilayah tersebut. Dan Inggris bahkan telah menyatakan klaimnya atas kepulauan ini jauh sebelum negara Argentina terbentuk, yakni pada tahun 1766-1770 dan pada tahun 1771-1774, serta telah meninggalkan prasasti kepemilikannya pada saat mereka harus meninggalkan pulau tersebut di tahun 1774.

²⁹ Hoffman, Fritz L and Olga Mingo, *Sovereignty in Dispute: The Falklands/Malvinas 1493-1982*, United States of America: Wetsview Press, 1984. Hal. 84

Selain daripada itu, Inggris masih memiliki pendekatan lain yang bisa menjadi pendukung bagi klaim Inggris atas Kepulauan Falkland, diantaranya adalah, Inggris mencoba untuk membalas segala macam bentuk klaim Argentina terhadap Kepulauan Falkland.

Klaim Inggris yang selanjutnya berlandaskan pada Resolusi 1514 PBB itu sendiri. Dalam salah satu asasnya, resolusi ini menekankan pada prinsip *self-determination*, yang mana dalam pemerintahan dalam negerinya, penduduk Falkland berhak untuk mengatur dan menentukan nasibnya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Di awal tahun 1968 telah terbentuk sebuah komisi yang bernama *the Falkland Islands Emergency Committee*, yang beranggotakan para penduduk Falkland, para pegawai Falkland Island Company, beserta beberapa anggota Parlemen.

Tujuan dari pembentukan komisi ini adalah untuk menentang penyerahan kedaulatan Falkland ke pemerintahan Argentina. Para penduduk lokal ini beranggapan, kependudukan Argentina tidak dapat menjamin terjadinya perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, antara Argentina dengan Falkland adalah dua wilayah yang sangat berbeda. Kedekatan geografi bukan berarti menjadikan kedua kawasan ini secara kultural memiliki

kesamaan. Antara Argentina dan Falkland, baik itu dari segi bahasa, budaya, hukum dan lain sebagainya, sangatlah bertentangan.

Akhirnya secara ringkas, dapat dikatakan bahwa klaim Inggris atas Kepulauan Falkland itu berdasarkan atas 2 hal, yang antara lain adalah:

1. Menurut Inggris, secara hukum internasional yang berlaku, Inggris memiliki hak untuk menganggap dan menyatakan Kepulauan Falkland sebagai bagian dari wilayahnya, karena Kepulauan Falkland merupakan wilayah yang telah lama dianeksasi oleh Inggris. Inggris juga meyakini bahwa dia telah menduduki dan mempunyai hak atas Kepulauan Falkland dalam waktu yang lama, dan hal tersebut bagi Inggris merupakan suatu alasan yang kuat bahwa Inggris memang sudah semestinya memegang kedaulatan Kepulauan Falkland.
2. Bagi Inggris, keinginan dari penduduk lokal Kepulauan Falkland yang lebih menginginkan menjadi bagian dari kedaulatan Inggris dibandingkan berada di bawah kedaulatan Argentina menjadi salah satu faktor yang menguatkan klaim Inggris atas Kepulauan Falkland.

B. Berbagai Upaya Perdamaian Antara Argentina dan Inggris

Beberapa upaya negosiasi diantara kedua negara yang bertikai sudah pernah dilakukan, bahkan dengan bantuan mediasi dari PBB. Hingga saat ini PBB secara giat berusaha untuk mendorong terjadinya negosiasi yang dapat menyelesaikan perselisihan diantara kedua negara. Peran serta PBB dalam penyelesaian sengketa wilayah ini dapat dilihat sejak tahun 1960, di mana pada masa itu PBB mengeluarkan resolusinya yang pertama mengenai hak pilih bagi Negara-negara kolonial dan penduduknya.

Dari beberapa resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB hingga saat ini, terdapat dua resolusi pokok yang melatarbelakangi perlunya diadakan perundingan diantara kedua negara guna membahas masa depan hubungan diantara keduanya, yaitu Resolusi 1514 dan Resolusi 2065.

1. Resolusi PBB (Resolusi 1514 dan Resolusi 2065)

Menanggapi pernyataan Argentina yang menentang serta menuntut tindakan kolonialisme agar segera dihentikan karena penerapannya sekarang sudah tidak dapat diterima lagi, PBB pada akhirnya kemudian mengambil sikap dengan mengeluarkan Resolusi 1514, pada 14 Desember 1960.

Tujuan dari resolusi ini sendiri adalah untuk mengakhiri kolonialisme di dunia. Resolusi ini mengakui hak-hak yang dimiliki

setiap negara bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan serta kebebasan dalam mengatur aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan keinginannya.³⁰

Oleh PBB, Argentina dan Inggris diminta untuk membuat daftar Negara-negara yang dianggap berada dalam kedaulatan negaranya masing-masing. Inggris kemudian menempatkan Kepulauan Falkland sebagai bagian dari persemakmurnya.

Hal ini tentu saja membuat Argentina gusar. Argentina menganggap Inggris telah salah menafsirkan resolusi tersebut. Argentina kemudian menjelaskan sikapnya berkaitan dengan resolusi ini, jika sejak dahulu Falkland (Malvinas) telah merupakan bagian dari kedaulatan Argentina dan bukan merupakan koloni dari negara manapun. Argentina juga menyatakan jika kependudukan Inggris atas Malvinas adalah merupakan suatu pelanggaran, dan oleh karena itu dianggap sebagai tindakan yang illegal.

Pemerintahan Argentina menegaskan, dari total populasi sekitar 2000 jiwa, hanya terdapat 12 keluarga saja yang merupakan penduduk tetap wilayah ini. Mayoritas penduduk dari kepulauan ini adalah para pekerja dari Falkland Islands Company, yang mana kependudukannya hanya bersifat sementara. Lebih lanjut, kepulauan ini hanya memiliki

³⁰ <http://www.un.org/documents/resolution1514.html>. Diakses pada 22 Oktober 2010

empat anggota dalam dewan legislatifnya. Oleh Argentina, kepulauan ini dianggap tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk dapat menjalankan pemerintahan yang otonom, sehingga satu-satunya cara untuk mendekolonisasi kepulauan ini dari tangan Inggris adalah dengan cara mengembalikannya ketangan pemiliknya yang sah, yaitu Argentina.³¹

Keputusan Inggris yang tetap bersikukuh dengan untuk memasukkan wilayah kepulauan ini sebagai bagian dari kedaulatannya, membuat PBB pada tahun 1961 memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang berfungsi menangani permasalahan ini. Komisi yang dikenal sebagai Komisi Dekolonialisasi 24 PBB ini, kemudian pada 13 November 1964 mengadopsi sebuah resolusi baru yang di dalamnya menyatakan bahwa, karena baik Argentina maupun Inggris sama-sama mengklaim kedaulatannya atas kepulauan tersebut, maka kedua negara hendaknya mulai melakukan negosiasi lebih lanjut guna menentukan masa depan Kepulauan Falkland beserta kepentingan penduduk kepulauan itu sendiri.

Pada November 1965, Duta Besar Republik Argentina untuk PBB, sekaligus juga delegasi Argentina untuk komisi dekolonialisasi PBB, Bonifacio del Carril, menyatakan bahwa Argentina selalu menjadi pendukung utama atas hak-hak otonomi suatu negara bangsa, akan tetapi

³¹ Hoffman, Fritz L and Olga Mingo, *Sovereignty in Dispute: The Falklands/Malvinas 1493-1982*, United States of America: Wetsview Press, 1984. Hal. 104

dalam kasus ini tidak terdapat penduduk yang cukup untuk mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurutnya, pandangan Inggris mengenai kesejahteraan penduduk di Malvinas sangatlah tidak tepat. Delegasi Inggris dalam komisi dekolonisasi tersebut bersikeras jika tingginya standar hidup di Falkland karena adanya campur tangan dari pemerintah Inggris, dan jika kawasan tersebut dikembalikan ke pihak Argentina, tentunya akan menurunkan standar hidup penduduk di kawasan tersebut.

Del Carril menyatakan dalam laporan PBB yang mengindikasikan bahwa Malvinas tidak memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan jumlah penduduk. Kenyataannya, mayoritas penduduk yang tinggal disini pada masa itu hanyalah orang-orang yang kebetulan sedang bertugas di sana, bukan untuk menetap secara permanen.

Del Carril juga menyatakan, bukan berarti pemerintahan Argentina tidak memikirkan nasib para penduduk Malvinas. Jika Inggris bersedia untuk diajak berunding guna menyelesaikan permasalahan ini, sesuai dengan rekomendasi dari Komite 24, tentunya juga akan tercipta formulasi yang tepat guna menjamin hak-hak serta aspirasi dari penduduk Malvinas itu sendiri.

Akhirnya, Pada 15 Desember 1965, upaya Del Carril ini membuahkan hasil dengan diadopsinya Resolusi 2065 pada Majelis Umum ke-20 PBB. Resolusi 2065 ini di dalamnya berisi anjuran kepada kedua belah pihak yang bertikai agar secepatnya untuk melakukan perundingan damai guna menemukan solusi yang tepat bagi masa depan Falkland.

2. Kerjasama di Bidang Transportasi dan Komunikasi

Resolusi 2065 dari PBB telah mendorong Argentina dan Inggris untuk segera mengadakan perundingan damai guna menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya. Lord Chalfont, duta besar Inggris untuk Amerika Latin, melakukan kunjungan untuk yang pertama kalinya ke Malvinas, setelah sebelumnya Chalfont menemani Ratu Inggris dalam kunjungan resminya di Brazil dan Chili.

Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi yang pertama kali dilakukan oleh perwakilan Inggris ke kawasan tersebut. Sebelum kembali menuju Inggris, Chalfont sempat singgah di Buenos Aires dan bertemu dengan Menlu Argentina pada masa itu, Nicanor Costa Méndez. Keduanya membuat pernyataan untuk lebih lanjut mendiskusikan masa depan Falkland (Malvinas).

Dari pertemuan ini, Inggris kemudian menyetujui sebuah perjanjian di bidang transportasi dan komunikasi antara Argentina dan Malvinas. Pengabaian Inggris atas wilayah Malvinas ini pada masa itu, menyebabkan para penduduk di sana sama sekali tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi dari luar. Satu-satunya cara bagi para penduduk untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, hanyalah melalui sebuah pemancar radio yang ada di salah satu menara pengawas.

Wilayah kepulauan yang terisolasi ini juga menyebabkan para penduduk Malvinas keuarangan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Dengan menjalin hubungan dengan Argentina, diharapkan para penduduk di sana bisa mendapatkan segala fasilitas hidup di berbagai bidang, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 1 April 1970, dimulailah pembahasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini diantara kedua negara. Pada 14 Juli 1970, Pemerintahan Inggris menerima proposal dari pihak Argentina mengenai upaya pengadaan sarana transportasi dan komunikasi antara Argentina dan Malvinas. Baru setelah setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21-30 Juni 1971, perwakilan dari kedua negara mengadakan pertemuan di Buenos Aires guna membahas lebih lanjut perjanjian tersebut, dan pada 1 Juli 1971 dibuatlah sebuah perjanjian antara kedua negara guna

merealisasi rencana pembangunan sarana transportasi dan komunikasi bagi penduduk Malvinas dengan Argentina.

Di dalam perjanjian kerjasama ini juga terdapat sebuah pernyataan lain yang mana kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut, Argentina dan Inggris, tidak boleh saling mengklaim kedaulatan Kepulauan Falkland (Las Islas Malvinas). Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 1971, dan pada tanggal 12 Agustus 1971, kedua negara mengumumkan perihal perjanjian ini pada PBB.³²

Perjanjian tersebut berupa perjanjian di bidang pengembangan sarana dan prasarana di bidang telekomunikasi seperti, pengadaan jasa pos, dokumen-dokumen resmi untuk perjalanan (visa), dan juga sarana dan prasarana di bidang transportasi seperti, penjadwalan pelayaran, pengadaan transportasi udara (Argentina membangun landasan udara sementara pada tahun 1971. Sedangkan Inggris, sesuai perjanjian yang sudah disepakati, yang akan membangun landasan udara permanen, yang kemudian direalisasi pada tahun 1974) dan sarana penunjang kehidupan penduduk Malvinas lainnya.

Perwakilan dari penduduk lokal kepulauan Malvinas juga turut serta diundang dalam menentukan sarana transportasi dan komunikasi yang mereka butuhkan. Kepada penduduk setempat, pemerintah Argentina

³² Ibid. Hal. 117

menawarkan untuk secara rutin mengadakan jadwal penerbangan mingguan dengan rute perjalanan pulang-pergi Stanley-Comodor Rivaria yang terletak di pesisir Patagonia. Penerbangan yang direncanakan ini mencakup penerbangan komersial dan juga sebagai alat transportasi kargo dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pemerintahan Argentina berusaha menarik simpati penduduk kepulauan dengan memberikan subsidi bagi penerbangan tersebut dan pemerintah Argentina hanya menetapkan tarif sebesar lima pound untuk jasa penerbangan antara Stanley-Comodor Rivadavia yang jarak tempuhnya sekitar 960 km.

Pemerintahan Argentina juga menawarkan bantuan teknis di bidang agrikultur, pengadaan prasarana medis, pendidikan serta pertukaran budaya, kepada para penduduk Malvinas. Argentina juga berusaha menampilkan sisi baik pemerintahannya, dengan memberikan kemudahan di bidang perijinan.

Di bidang perijinan, visa buatan Argentina ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Spanyol, tanpa terdapat sidik jari dan tanggal berakhirnya visa, serta di dalamnya sama sekali tidak dicantumkan kebangsaan pemilik visa, hanya terdapat keterangan tempat lahir dari si pemilik visa saja, yang hanya ditulis dalam bahasa Spanyol. Pemerintahan

Argentina juga memberikan kemudahan perizinan kepada para penduduk Malvinas yang ingin tinggal dan menetap di Argentina, tanpa dipungut biaya apapun dalam proses imigrasinya. Pemerintahan Inggris sendiri juga sepakat untuk membebaskan biaya yang dibebankan pada warga Argentina yang ingin mengunjungi Kepulauan Falkland.

Di bidang pendidikan, di awal tahun 1972, pemerintahan Argentina memberikan lima puluh beasiswa bagi penduduk Malvinas yang ingin melanjutkan studinya di Argentina. Hanya dua pelajar saja yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Inggris setiap tahunnya, hanya saja karena keterbatasan biaya, kebanyakan dari para pelajar tersebut mereka hanya sanggup untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah milik pemerintahan Inggris di Montevideo.

Dapat dikatakan, sebelum peristiwa Perang Falkland yang melibatkan kedua negara terjadi, periode ini merupakan periode baik bagi Argentina dan Inggris, di mana terjadi peningkatan hubungan bilateral diantara kedua negara. Carlos Ortiz de Rozas, duta besar Argentina untuk PBB menyatakan, perjanjian diantara kedua negara ini mampu membuktikan bahwasanya Argentina dan Inggris dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kerangka Piagam PBB.

3. Kerjasama Atas Aktivitas Lepas Pantai di Kawasan Barat Daya Atlantik

Setelah peristiwa Perang Falkland berakhir dengan kekalahan di pihak Argentina, hubungan diplomatik kedua negara sempat terputus selama beberapa waktu. Hingga akhirnya, kedua negara berinisiatif untuk menormalisasi kembali hubungan diplomatik kedua negara yang sempat terputus selama 13 tahun tersebut.

Hubungan ini diawali dengan disepakatinya sebuah perjanjian diantara kedua negara. Perjanjian ini ditandatangani di New York pada 27 September 1995 oleh Malcolm Rifkind MP sebagai perwakilan dari Inggris dan oleh Dr. Guido Di Tella sebagai perwakilan dari Argentina. Perjanjian kerjasama ini mengatur tentang aktivitas eksplorasi hidrokarbon di lepas pantai kawasan Barat Daya Atlantik.³³

Perjanjian ini merupakan implementasi dari Deklarasi Bersama yang disepakati oleh kedua negara di Madrid pada tahun 1990, yang mana di dalamnya mengatur usaha kedua negara dalam menjamin keamanan di kawasan Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan dan Sandwich Selatan dan perairan sekitarnya. Selain itu, dalam Joint Declaration ini terdapat poin

³³ <http://www.google.com/www.falklands.info/history/1990agreement.html>. Diakses pada 15 November 2010

yang menyatakan hendaknya kedua negara tidak mengambil tindakan apapun yang dapat memancing konflik diantara kedua negara selain upaya membangun perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Di dalam perjanjian ini pemerintahan kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam mendorong aktivitas eksplorasi dan eksploitasi kandungan hidrokarbon di kawasan Barat Daya Atlantik. Pada mulanya, perjanjian ini diharapkan dapat membuka lebar pintu jalinan kerjasama antara kedua negara. Dapat dikatakan periode ini merupakan periode terbaik dalam hubungan kedua negara, hingga akhirnya perjanjian ini juga gagal dalam menjamin hubungan kerjasama diantara kedua negara.

Pada 2007, Argentina mengambil sikap dengan menolak perjanjian kerjasama yang telah disepakati di tahun 1995 tersebut, setelah selama 12 tahun perjanjian ini tidak juga terealisasi. Presiden Argentina, Fernández de Kirchner, menganggap perjanjian ini hanya sebagai dalih Inggris untuk menghindari pembahasan mengenai kedaulatan atas Malvinas dengan Argentina, karena memang dalam kurun waktu tersebut, Inggris sama sekali tidak memperlihatkan sikap untuk kembali melanjutkan perundingan mengenai kedaulatan Malvinas ini dengan Argentina, sesuai dengan resolusi 2065 PBB yang menyerukan agar kedua negara untuk setiap tahunnya kembali mengadakan perundingan guna membahas

permasalahan ini, pemerintahan Inggris seringkali mengabaikan tindakan ini. Keadaan ini tentunya semakin membuat hubungan diantara kedua negara semakin meregang.

Pertikaian antara kedua negara ini semakin memanas ketika pada bulan Februari 2010, Inggris mengumumkan untuk melakukan pengeboran minyak di kawasan yang menjadi persengketaan kedua negara ini. Eksplorasi minyak secara sepihak yang dilakukan oleh Inggris di kawasan Malvinas tentunya tidak dapat diterima oleh Argentina.

Argentina melancarkan protesnya terhadap Inggris diawali dengan penahanan kapal *Thor Leader*, salah satu kapal penarik alat-alat pengebor minyak milik industri perminyakan Inggris, Desire Petroleum, yang mengangkut peralatan pengeboran minyak. Pihak berwenang Argentina menahan kapal ini saat kapal tersebut berada di pelabuhan Campana, Argentina Selatan, setelah mengetahui kapal tersebut membawa kargo pipa-pipa yang digunakan untuk industri minyak dan berencana menuju ke Malvinas.³⁴

Argentina juga semakin gencar melancarkan protesnya atas tindakan Inggris tersebut, dengan memerintahkan semua kapal kapal yang menuju ke Kepulauan Malvinas harus melalui perairannya dan meminta

³⁴<http://internasional.kompas.com/read/2010/01/19/12033495/Argentina.Kembali.Klaim.Malvinas..Inggris.Berang>. Diakses pada 10 November 2010

izin dari Buenos Aires. Presiden Argentina Cristina Kirchner telah menandatangani satu keputusan yang mengharuskan semua kapal yang ingin bergerak antara pelabuhan-pelabuhan di Argentina dan pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Malvinas, atau yang akan memasuki perairan Argentina ketika menuju pulau-pulau itu harus mendapat izin.³⁵

Kepala Staf Kirchner, Anibal Fernandez, menegaskan, tindakan ini bertujuan untuk mengawasi dengan ketat kapal-kapal yang mungkin membantu Inggris melakukan operasi untuk menyelidiki cadangan minyak dan mineral di kepulauan yang oleh Inggris disebut Falkland itu. Fernandez juga menyatakan, selain untuk mempertahankan kedaulatan Argentina, keputusan tersebut juga dibuat untuk melindungi semua sumber daya alam yang terdapat di kawasan tersebut.

Melalui menteri luar negerinya, Jorge Taiana, Argentina juga berupaya mengajukan protesnya atas upaya pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan minyak milik Inggris tersebut ke badan PBB. PBB sendiri kembali meminta Inggris, yang mana juga merupakan salah satu anggota DK PBB, untuk segera kembali mengadakan perundingan damai dengan Argentina, yang mana hingga saat ini belum tercapai kesepakatan diantara keduanya.

³⁵ Ibid.